

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO 39
TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH UNTUK MENUNJANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DI PROVINSI GORONTALO**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama : Hukum dan Kebijakan Publik



NURHAYATI OLII

NIM. S. 311005027

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012**

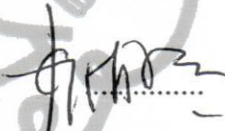
**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO 39
TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH UNTUK MENUNJANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DI PROVINSI GORONTALO**

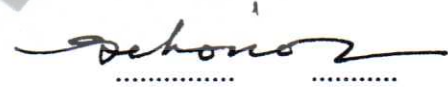
Disusun oleh :

NURHAYATI OLII
NIM. S. 311005027

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing:
Dewan Pembimbing:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
---------	------	--------------	---------

Pembimbing I	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH</u> NIP.196302091988031003	
--------------	---	--	-------

Pembimbing II	<u>Prof. Dr. H. Setiono, SH.,MS.</u> NIP. 194405051969021001	
---------------	--	--	-------

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum




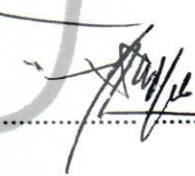

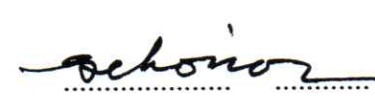

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH.
Nip.196302091988031003

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO 39
TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD UNTUK MENUNJANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROVINSI GORONTALO**

Disusun oleh :


NURHAYATI OLII
NIM. S. 311005027

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	<u>Dr. M. Hudi Asrori, SH, M.Hum</u> NIP. 196011071989111001	
Sekretaris	<u>Moch. Najib Imanullah, SH, MH, Ph.D.</u> NIP. 195908031985031001	
Anggota	<u>Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH</u> NIP.196302091988031003	
Anggota	<u>Prof. Dr. H. Setiono, SH, MS</u> NIP. 194405051969021001	

Mengetahui

Direktur Program



Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.
NIP. 1961071719861101

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH
NIP.196302091988031003

PERNYATAAN

Nama : NURHAYATI OLII
NIM : S. 311005027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD UNTUK MENUNJANG PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROVINSI GORONTALO** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila benar di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut, Selanjutnya untuk menunjukkan keasliannya, saya memperbolehkan tesis ini di-*upload* dalam *website* Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, Oktober 2012

Yang Membuat Pernyataan



NURHAYATI OLII

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan baik. Penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD UNTUK MENUNJANG PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROVINSI GORONTALO”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam ilmu Hukum Kebijakan Publik pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS, Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Surakarta.
3. Bapak Prof Dr. Adi Sulistiyono, SH,MH, Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Surakarta sekaligus pembimbing II yang selalu memberikan petunjuk dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof Dr. H. Setiono, SH,MS, Selaku pembimbing I yang selalu memberikan petunjuk dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan staf administrasi Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Surakarta.
6. Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo yang telah memberikan kesempatan dan batuan serta dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Surakarta.
7. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang selalu memberikan dorongan dalam penyelesaian studi

8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo yang senantiasa memberikan motivasi dalam penyelesaian studi
9. Kepala Biro Umum dan Humas Setda Provinsi Gorontalo yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti dalam penyelesaian studi
10. Wakil Walikota Gorontalo yang telah membantu dan memberikan motivasi pada kami untuk melanjutkan studi di Universitas Sebelas Maret Surakarta
11. Kepala Bidang Anggaran BKD Provinsi Gorontalo yang telah banyak memberikan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian studi Program Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Surakarta.
12. Staf Keuangan Daerah Setda Provinsi Gorontalo yang selalu membantu peneliti dalam pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian studi
13. Orang tuaku yang tercinta (Ibu Mintje Tangkudung dan Alhm. Husain A.B. Olli yang selalu mendoakan keberhasilan studi penulis.
14. Suami tercinta Bapak H. Djohar Ahmad, S.Pd dan anak-anakku tersayang Numaningsih, Priyono dan Trihartanto yang selalu menjadi motivator dan inspirator dalam penyelesaian studi ini.
15. Rekan-rekan sejawat dan seperjuangan, warlin, ika, leni, nena, multi, utam

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap tesis yang disusun ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. Amiin.

Surakarta, Oktober 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Implementasi dan Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)	9
2. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik.....	11
3. Hubungan Hukum Kebijakan Publik.....	16
4. Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat	21
5. Tinjauan Tentang Akuntansi Pemerintah.....	23
6. Otonomi Daerah.....	28
7. Tinjauan Keuangan Daerah.....	35
8. Anggaran Pendapatan dan ^u Belanja Daerah.....	47
9. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	51
B. Kerangka Pikir.....	52

BAB III	METODE PENELITIAN.....	54.
	A. Jenis Penelitian.....	54
	B. Lokasi Penelitian.....	54
	C. Jenis dan Sumber Data.....	54
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
	E. Validasi Data.....	59
	F. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
	A. Hasil Penelitian	65
	B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	87
BAB V	PENUTUP.....	97
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Implikasi Penelitian.....	98
	C. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....		100

ABSTRAK

NURHAYATI OLII, S 311005027, 2012, IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD UNTUK MENUNJANG PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROVINSI GORONTALO .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2009 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD dan juga ntuk mengetahui apakah dengan pelaksanaan Pergub tersebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Gorontalo.

Jenis penelitian dalam penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan jawaban mengapa mekanisme tentang pelaksanaan pembayaran atas beban APBD belum berjalan sesuai Pergub Nomor 39 Tahun 2009.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interaksional/mikro, dengan analisis kualitatif, yakni suatu upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa pada dasarnya penerapan pergub No. 39 Tahun 2009 tentang mekanisme pambayaran atas beban APBD telah berjalan dengan yang diharapkan oleh pergub. Adanya penilaian BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2009-2011 yang mendapat opini WDT tidak semata-mata karena gagalnya penerapan Pergub No. 39 Tahun 2009 tetapi disebabkan oleh beberapa factor antara lain pada laporan keuangan 2009 karena ditemukannya perjalanan dinas yang tidak bisa diyakini kebenarannya oleh auditor pada DPRD dimana nilainya secara material bisa menyebabkan turunnya opini karena sangat besar, tahun 2010 opini WDP karena terjadinya selisih kas pada beberapa SKPD karena tidak disiplinnya bendahara pengeluaran dalam pertanggungjawaban keuangan, sementara untuk tahun 2011 opini WDP karena masalah asset yang belum terdata dengan baik. Oleh karena itu opini WDP tidak secara langsung akibat tidak diterapkannya pergub secara baik, karena pergub pada dasarnya mengatur tentang system dan prosedur penatausahaan keunagan yang salah satu indicator penilaiannya adalah kecepatan dalam pemberian layanan oleh BKD kepada SKPD.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009, Pengelolaan keuangan

ABSTRACT

NURHAYATI OLII, S 31100502, 2012, Implementation Governor Regulation Number 39 Year of 2009 Regarding Mechanism of Paying Implementation of Charge of APBD (Budget and Income and Expenses of the Regional Government) to Support Fund Management in Gorontalo Province.

This research aims to know how is the implementation of Governor regulation number 39 year of 2009 regarding mechanism of payment implementation of charge of APBD and also to know if the implementation of Governor regulation has increased management of regional government finance in the province of Gorontalo.

The kind of the research in this research is sociology law research. This research try to gain answers how mechanism of payment implementation of the charge of APBD has not yet run according to governor regulation number 39 year of 2009.

The approach used is interactional /micro approach , with qualitative approach which is continuously , repeatedly , while method used is qualitative method, that is a design of the research which produce anatictic descriptive data, they are what respondents stated in written and also it's real behaviour, studied and learnt as a comprehensive thing.

From the result of the research, it is founded that basically the implementation of governor regulation number 2009 year of 2009 regarding to mechanism of payment of charge of APBD has run as it is hoped by the government of Gorontalo government year of 2009-2011 which gained Opinion of WDT (normal with exception) which did not caused only of the failure of the implementation of governor regulation number 39 year of 2009, but also caused of some factors they are in the finance report year of 2009 in which is founded that there is reported official trip from DPRD believed by auditor not right that it's value materially can cause the opinion get down because it is very big, in the year of 2010 opinion of WDP, because there is dispute of cash in some SKPD (Unit of regional government officers), because of the chasier of purchasing is not discipline in making financial report, while in the year of 2011 opinion of WDP, because of asset which has not yet been registered well. Therefore opinion of WDP wasn't directly caused by the not well implementation of governor regulation , because governor regulation is basically to regulate about system and procedure of finance administration which one of it's indicator is speed in giving service by BKD (Regional Government Finance Agency) to SKPD

Keywords : Regional Government Finance.